

Dinamika Garis Kemiskinan dan Tingkat Kemiskinan 10 Provinsi di Indonesia Tahun 2015-2024

Ari Maulana^{1*}, Fasha Siti Fatimah², Ihda Aulia Mutmainah³, Ismi Marhamah⁴, Wanda Hamidah⁵, Apip Supriadi⁶

¹⁻⁶ Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Siliwangi, Indonesia

223401092@student.unsil.ac.id¹, 223401094@student.unsil.ac.id², 223401095@student.unsil.ac.id³,

223401097@student.unsil.ac.id⁴, 223401098@student.unsil.ac.id⁵, apipsupriadi@unsil.ac.id⁶

*Penulis Korespondensi: 223401092@student.unsil.ac.id

Abstract. *This study aims to analyze the effect of inflation, Gross Regional Domestic Product (GRDP), and the Provincial Minimum Wage (PMW) on the poverty line in 10 provinces in Indonesia. The research employs a quantitative approach using panel data regression analysis. The data utilized in this study consist of panel data covering a 10-year period, from 2015 to 2024, obtained from the Provincial Offices of Statistics and Statistics Indonesia (Badan Pusat Statistik/BPS). To examine the relationship between variables across regions and over time, the fixed effect model is applied in the analysis. The results of the analysis indicate that inflation and GRDP do not have a statistically significant effect on the poverty line in the 10 provinces examined. These findings suggest that although inflation and GRDP are important macroeconomic indicators, their variations during the study period were not sufficient to directly influence changes in the poverty line across the provinces. In contrast, the Provincial Minimum Wage (PMW) is found to have a significant effect on the poverty line. This result implies that increases in the minimum wage play a crucial role in improving household purchasing power, which can contribute to reducing poverty levels. Overall, the findings highlight the importance of wage policy as an effective instrument for poverty alleviation at the provincial level. While broader economic growth and price stability remain important, policies related to minimum wage determination appear to have a more direct and measurable impact on poverty conditions. Therefore, policymakers are encouraged to consider wage policies alongside other macroeconomic strategies to achieve more effective poverty reduction outcomes.*

Keywords: GRDP; Inflation; Panel Data Regression; Poverty Line; Provincial Minimum Wage

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh inflasi, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan Upah Minimum Provinsi (UMP) terhadap garis kemiskinan di 10 provinsi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis regresi data panel. Data yang digunakan adalah data panel yang mencakup periode 10 tahun, dari tahun 2015 hingga 2024, yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi dan BPS Indonesia. Dalam analisis ini, digunakan model *fixed effect* untuk mengidentifikasi hubungan antar variabel. Hasil analisis menunjukkan bahwa inflasi dan PDRB tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap garis kemiskinan di 10 provinsi yang diteliti. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun inflasi dan PDRB merupakan indikator ekonomi penting, keduanya tidak cukup mempengaruhi tingkat kemiskinan di provinsi-provinsi tersebut selama periode yang diteliti. Sebaliknya, Upah Minimum Provinsi (UMP) terbukti memiliki pengaruh signifikan terhadap garis kemiskinan. Kenaikan UMP dapat meningkatkan daya beli masyarakat, sehingga dapat menurunkan tingkat kemiskinan. Temuan ini mengindikasikan pentingnya kebijakan upah minimum dalam pengentasan kemiskinan di tingkat provinsi, meskipun faktor lain seperti inflasi dan PDRB juga perlu diperhatikan dalam kebijakan ekonomi.

Kata kunci: Garis Kemiskinan; Inflasi; PDRB; Upah Minimum Provinsi; Regresi Data Panel

1. LATAR BELAKANG

Garis kemiskinan merupakan indikator penting yang digunakan BPS untuk menentukan jumlah penduduk miskin. Nilainya berbeda antar provinsi karena dipengaruhi harga kebutuhan pokok dan standar konsumsi. Perubahan garis kemiskinan berdampak pada jumlah penduduk miskin. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis dinamika garis kemiskinan serta hubungannya dengan tingkat kemiskinan antar provinsi

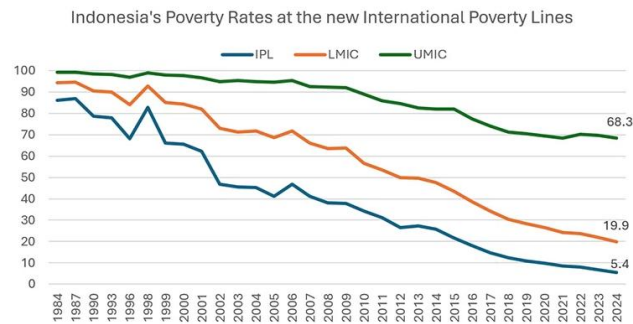
Kemiskinan merupakan masalah multidimensi dan menempati posisi teratas dalam agenda pembangunan nasional Indonesia. Penanganan kemiskinan memerlukan data yang akurat dan pemahaman komprehensif tentang penyebabnya agar kebijakan dapat disesuaikan untuk mencapai tujuannya. Badan Pusat Statistik (BPS), sebagai lembaga statistik resmi pemerintah, memiliki tanggung jawab penting dalam menyajikan data dan indikator kemiskinan yang menjadi dasar penilaian pemerintah dan pengembangan program.

Salah satu ukuran utama yang diterapkan adalah Garis Kemiskinan (GK). GK menggambarkan jumlah pengeluaran minimum yang diperlukan bagi individu untuk memenuhi kebutuhan dasar pangan dan non-pangan selama satu bulan, guna memastikan kehidupan yang layak. Ukuran ini berfungsi sebagai acuan penting, karena BPS secara resmi menyatakan bahwa orang miskin adalah mereka yang pengeluaran rata-rata per kapita bulanan di bawah GK. Dengan demikian, dinamika Garis Kemiskinan menjadi penentu utama dalam statistik kemiskinan nasional.

Tantangan ini semakin kompleks mengingat Indonesia merupakan negara kepulauan dengan wilayah yang luas dan keragaman sosial-ekonomi yang tinggi. Akibatnya, Garis Kemiskinan tidak seragam secara nasional, melainkan bervariasi secara signifikan antar provinsi. Perbedaan ini disebabkan oleh GK yang sangat sensitif terhadap ketidaksetaraan harga barang-barang kebutuhan pokok dan perbedaan pola konsumsi serta norma di berbagai wilayah. Misalnya, biaya untuk memenuhi kebutuhan pangan dan non-pangan di provinsi-provinsi yang berpusat pada aktivitas ekonomi seperti DKI Jakarta cenderung jauh lebih mahal dibandingkan dengan provinsi-provinsi di Indonesia timur. Dinamika ini berarti bahwa perubahan tingkat kemiskinan tidak hanya bergantung pada fluktuasi pendapatan penduduk, tetapi juga pada pergeseran GK itu sendiri. Perubahan pada GK akan secara langsung mempengaruhi jumlah orang yang diklasifikasikan sebagai miskin; peningkatan GK, dengan asumsi faktor lain tetap konstan, akan meningkatkan jumlah orang miskin, dan sebaliknya. Perbedaan ini mencerminkan disparitas harga kebutuhan pokok dan standar konsumsi lokal. Fenomena ini juga menimbulkan pertanyaan tentang kaitan antara standar biaya hidup (Garis Kemiskinan) dan jumlah penduduk miskin (Tingkat Kemiskinan) di setiap daerah.

Perspektif ini sejalan dengan praktik global. Bank Dunia (World Bank, 2025), misalnya, menggunakan beberapa garis kemiskinan internasional untuk merefleksikan perbedaan tingkat pembangunan ekonomi. Selain garis kemiskinan ekstrem (\$2.15/hari), Bank Dunia juga menetapkan garis kemiskinan \$3.65 per hari yang dianggap lebih relevan untuk negara berpenghasilan menengah ke bawah (*lower-middle income*) seperti Indonesia. Penggunaan standar yang berbeda ini menggarisbawahi pentingnya konteks lokal dalam

mendefinisikan kemiskinan, sekaligus memperkuat justifikasi untuk mengkaji secara spesifik dinamika GK di tingkat provinsi.



Gambar 1. Data Garis Kemiskinan di Indonesia

Sumber : World Bank

Dampak penggunaan standar kemiskinan yang berbeda dapat terlihat jelas melalui data historis tingkat kemiskinan di Indonesia yang disajikan oleh World Bank. Grafik tersebut menunjukkan tiga narasi berbeda tentang kondisi kemiskinan di Indonesia berdasarkan ambang batas yang digunakan. Pada garis kemiskinan internasional (IPL), yang mengukur kemiskinan ekstrem, angkanya telah menurun drastis hingga mencapai 5,4% pada tahun 2024, mencerminkan keberhasilan Indonesia dalam program pengentasan kemiskinan dasar. Sementara itu, pada garis kemiskinan negara berpendapatan menengah bawah (LMIC), yang menggunakan standar lebih tinggi, tingkat kemiskinan tercatat tetap pada 19,9%, menggambarkan jutaan orang yang meskipun tidak masuk kategori kemiskinan ekstrem, masih hidup dalam kerentanan dan tingkat kesejahteraan rendah. Dengan menggunakan standar yang lebih aspiratif, yaitu garis kemiskinan UMIC, mayoritas penduduk Indonesia mencapai 68,3% masih berada di bawah garis ini.

Ilustrasi ini secara jelas mengonfirmasi argumen utama studi ini: pemilihan dan pergerakan Garis Kemiskinan bukanlah sekadar masalah teknis, melainkan faktor penentu utama profil kemiskinan suatu negara. Garis Kemiskinan Nasional yang ditetapkan oleh BPS secara konseptual lebih dekat dengan standar LMIC. Fakta bahwa masih ada segmen populasi yang besar dan rentan di sekitar garis ini membuat studi tentang faktor-faktor (seperti inflasi, PDRB, dan upah minimum) yang dapat menggeser garis tersebut menjadi sangat krusial.

Fenomena ini menyoroti bahwa pergerakan GK itu sendiri layak untuk diteliti secara mendalam. Beberapa indikator makroekonomi diyakini memiliki dampak kuat pada dinamika GK di tingkat provinsi. Inflasi, misalnya, secara langsung melemahkan daya beli dan menaikkan harga barang-barang pokok, yang pada akhirnya meningkatkan GK (Tisniwati 2012). Sementara itu, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita, yang mencerminkan kemajuan ekonomi dan pendapatan rata-rata di suatu wilayah, juga diyakini

berperan. Pertumbuhan ekonomi yang cepat diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan, namun pada saat yang sama memicu lonjakan standar hidup dan biaya, sehingga berkontribusi pada penetapan GK. Selain itu, Upah Minimum Provinsi (UMP) sebagai mekanisme perlindungan sosial bagi pekerja formal dapat mempengaruhi daya beli dan norma konsumsi kelompok berpenghasilan rendah, yang pada gilirannya terkait dengan unsur-unsur pengeluaran yang mendasari perhitungan GK (Sulistiawan 2023).

Mengingat keragaman antar provinsi dan pengaruh berbagai faktor makroekonomi, diperlukan analisis komprehensif terhadap dinamika GK dan hubungannya dengan tingkat kemiskinan di semua provinsi di Indonesia. Studi sebelumnya sering kali menganalisis faktor-faktor yang secara langsung mempengaruhi tingkat kemiskinan. Namun, penelitian yang secara khusus memodelkan GK sebagai variabel yang dianalisis dengan data panel provinsi pada periode waktu terbaru masih memerlukan eksplorasi lebih lanjut.

Oleh karena itu, studi ini bertujuan untuk menganalisis dinamika GK di 34 provinsi di Indonesia selama periode 2015-2024. Melalui pendekatan regresi data panel, studi ini akan menganalisis dampak variabel independen seperti inflasi, PDRB per kapita, dan upah minimum terhadap GK sebagai variabel dependen. Temuan studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pemahaman yang lebih mendalam bagi pembuat kebijakan dalam mengembangkan pendekatan pengurangan kemiskinan yang lebih efektif sesuai dengan karakteristik masing-masing provinsi.

2. KAJIAN TEORITIS

Garis kemiskinan merupakan salah satu indikator utama yang digunakan untuk mengukur tingkat kemiskinan di suatu wilayah. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), garis kemiskinan adalah batas pengeluaran minimum yang harus dimiliki oleh seseorang atau rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup layak, yang meliputi kebutuhan pangan dan non-pangan. Pendekatan yang digunakan BPS dalam menentukan garis kemiskinan adalah pendekatan kebutuhan dasar (*basic needs approach*) di mana pendekatan tersebut berfokus pada pemenuhan kebutuhan per kapita sehari sebagai dasar garis kemiskinan makanan. Selain itu, garis kemiskinan juga memperhitungkan kebutuhan non-pangan seperti sandang, perumahan, pendidikan, dan kesehatan yang dianggap sebagai kehidupan yang layak. Dengan demikian, garis kemiskinan mencerminkan batas minimum pengeluaran yang diperlukan agar seseorang tidak dikategorikan miskin. Konsep ini sangat penting dalam konteks perencanaan dan evaluasi kebijakan pengentasan kemiskinan, karena memberikan gambaran kuantitatif tentang jumlah penduduk yang belum mampu memenuhi kebutuhan dasar tersebut. BPS secara

rutin memperbarui data garis kemiskinan untuk menyesuaikan dengan perubahan harga dan pola konsumsi masyarakat, sehingga kebijakan yang diambil dapat lebih tepat sasaran.

Teori biaya hidup dan konsumsi minimum merupakan teori yang mengukur kemiskinan berdasarkan kebutuhan minimum yang harus dipenuhi agar bisa mendapatkan kehidupan yang layak. Teori ini diambil dari pendekatan bahwa setiap manusia membutuhkan sejumlah konsumsi minimum untuk tetap produktif dalam kehidupannya. Oleh karena itu, biaya hidup minimum dihitung berdasarkan harga dan kuantitas barang serta jasa yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar tersebut. Dalam konteks pengukuran kemiskinan, konsumsi minimum menjadi pengukuran utama untuk menentukan apakah seseorang atau rumah tangga berada di bawah garis kemiskinan. Jika pengeluaran aktual mereka lebih rendah dari biaya hidup minimum, maka mereka dikategorikan sebagai miskin. Pendekatan ini juga menekankan pentingnya memperhitungkan kebutuhan non-pangan seperti pendidikan, kesehatan, dan perumahan, yang berkontribusi pada kualitas hidup yang layak. Dengan demikian, teori ini memberikan dasar yang kuat bagi pemerintah dan lembaga terkait dalam merancang program bantuan sosial dan kebijakan pengentasan kemiskinan yang efektif (K. Dan 2023).

Menurut Todaro & Smith (2015), kemiskinan merupakan masalah kekurangan pendapatan dan hasil dari proses pembangunan ekonomi yang tidak merata yang menghasilkan pertumbuhan yang tidak seimbang antara sektor modern dan sektor tradisional. Sektor modern yang menggunakan teknologi tinggi cenderung terbatas dalam penyerapan tenaga kerja, sementara sebagian besar tenaga kerja masih berada di sektor tradisional yang produktivitasnya rendah dan pendapatannya minim. Ketidakseimbangan ini menyebabkan munculnya kemiskinan struktural, di mana sebagian besar penduduk tidak mendapatkan manfaat dari pertumbuhan ekonomi. Todaro dan Smith juga menekankan pentingnya kebijakan pembangunan yang mampu menciptakan lapangan kerja yang luas dan meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Dengan demikian, pengentasan kemiskinan harus menjadi bagian integral dari strategi pembangunan ekonomi agar pertumbuhan yang terjadi dapat dirasakan secara merata dan berkelanjutan (T. Dan, Dalam, & Global n.d.)

Gregory Mankiw dalam bukunya *Principles of Economics* (2020) menjelaskan bahwa inflasi adalah fenomena kenaikan umum dan terus-menerus dalam tingkat harga barang dan jasa di suatu perekonomian. Inflasi dapat terjadi karena berbagai faktor, antara lain peningkatan permintaan agregat yang melebihi kapasitas produksi (*demand-pull inflation*) dan kenaikan biaya produksi seperti upah dan harga bahan baku (*cost-push inflation*). Inflasi yang tinggi dan tidak terkendali dapat menurunkan daya beli masyarakat, terutama kelompok berpendapatan

rendah yang pengeluarannya sebagian besar digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Kondisi ini dapat memperburuk kemiskinan karena harga kebutuhan pokok yang meningkat membuat masyarakat miskin semakin sulit memenuhi kebutuhan dasar mereka. Selain itu, inflasi juga dapat menimbulkan ketidakpastian ekonomi yang menghambat investasi dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Oleh karena itu, pengendalian inflasi menjadi salah satu fokus utama kebijakan moneter dan fiskal untuk menjaga stabilitas harga dan kesejahteraan masyarakat.

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian mencakup serangkaian langkah-langkah sistematis yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Sugiyono & Prasetyawati 2019). Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian regresi data panel. Regresi data panel merupakan analisis regresi yang didasarkan pada data panel dalam melihat hubungan antara satu variabel terikat dengan satu atau lebih variabel bebas (Ii et al., 2022). Teknik analisis yang digunakan adalah regresi data panel dengan model yang dipilih akan didasarkan pada hasil uji Hausman dan Chow untuk menentukan apakah *Fixed Effect Model* (FEM) atau *Random Effect Model* (REM) yang lebih sesuai.

Tabel 1. Operasionalisasi Variabel

No	Variabel	Definisi	Notasi	Satuan	Skala
1.	Garis Kemiskinan	Garis Kemiskinan (GK) adalah batas minimum pendapatan yang dibutuhkan suatu daerah untuk memenuhi standar hidup yang layak. GK terdiri dari dua komponen, diantaranya yaitu Garis Kemiskinan Makanan dan Garis Kemiskinan Non-Makanan. Besaran ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan perhitungan kebutuhan dasar dari kedua komponen tersebut (Yesi, 2021).	Y	Rupiah/ Kapita/ Bulan	Rasio
2.	Inflasi	Inflasi merupakan fenomena makroekonomi yang ditandai dengan peningkatan harga secara umum dan berlangsung terus-menerus. Inflasi tercermin dari kenaikan harga yang terjadi secara berkelanjutan serta meluas, sehingga mengakibatkan daya beli masyarakat terhadap barang dan jasa menurun (Permana, 2023).	INF	%	Rasio
3.	PDRB Per Kapita	PDRB per kapita merupakan indikator pembangunan yang menggambarkan rata-rata pendapatan masyarakat di suatu daerah. Semakin tinggi nilai PDRB per kapita, semakin besar pula	PDRB	Ribu Rupiah	Rasio

4. Upah Minimum Provinsi	potensi penerimaan daerah karena meningkatnya kemampuan ekonomi penduduknya (Laut, 2020). Upah Minimum Provinsi (UMP) adalah ketentuan upah terendah yang diberlakukan secara seragam pada seluruh kabupaten/kota di suatu provinsi. Besarnya UMP ditentukan setiap tahun oleh gubernur sebagai perwakilan pemerintah daerah (Mahila, 2017).	UMP	Rupiah (Rp)	Rasio
--------------------------	--	-----	-------------	-------

Analisis Data

Penelitian menggunakan analisis data kuantitatif, yaitu berupa analisis statistik inferensial dengan maksud untuk mendapatkan kesimpulan dari variabel-variabel yang diteliti berdasarkan data yang diperoleh yaitu *variable* garis kemiskinan, inflasi, pdrb per kapita, dan upah minimum provinsi. Data yang digunakan merupakan data sekunder dalam bentuk panel, yang merupakan gabungan antara data *time series* (berdasarkan periode waktu dari tahun 2015 hingga 2024) dan data *cross section* (berdasarkan wilayah, yaitu Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Timur, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Banten, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Lampung, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, dan Provinsi Papua). Penelitian ini menggunakan *E-views* sebagai aplikasi untuk memberikan hasil penelitian.

Secara umum, model umum regresi data panel adalah sebagai berikut.

$$GK_{it} = \beta_0 + \beta_1 INF_{it} + \beta_2 PDRB_{it} + \beta_3 UMP_{it} + \epsilon_{it}$$

Dengan:

GK_{it} = garis kemiskinan provinsi i tahun t

INF_{it} = inflasi provinsi i tahun t

$PDRB_{it}$ = PDRB per kapita provinsi i tahun t

UMP_{it} = upah minimum provinsi i tahun t

Common Effect Model (CEM)

Model ini merupakan metode paling sederhana dalam regresi data panel dengan cara menggabungkan data *time series* dan *cross section* tanpa memperhatikan perbedaan antar individu maupun waktu. Estimasi dilakukan menggunakan metode OLS (*Ordinary Least Square*). Model ini sering digunakan hanya sebagai pembanding, karena tidak mempertimbangkan perbedaan karakteristik antar unit sehingga berpotensi menimbulkan bias (Sugiyono and Prasetyawati 2019). Adapun persamaan Common Effect Model (CEM) yaitu sebagai berikut.

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_j X_{it}^j + \epsilon_{it}$$

Dengan:

Y_{it} : variabel dependen pada individu ke- i dan waktu ke- t

β_0 : konstantan atau intersep

X_{it}^j : variabel dependen ke- j pada individu ke- i dan waktu ke- t

β : koefisien regresi untuk variabel dependen ke- j

ε_{it} : *error term*

Fixed Effect Model (FEM)

Model ini mengasumsikan adanya perbedaan karakteristik antar individu atau waktu yang tetap (konstan). Estimasi dilakukan dengan metode *Least Square Dummy Variable* (LSDV). Model ini cocok digunakan jika perilaku tiap individu berbeda dan hasil pengujian *Likelihood Ratio Test* menunjukkan nilai signifikan, sehingga model *Fixed Effect* lebih tepat digunakan dibanding *Common Effect* (Sugiyono, 2019). Adapun persamaan *Fixed Effect* Model (FEM) yaitu sebagai berikut.

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \dots + \beta_j X_{jit} + \alpha_i + \varepsilon_{it}$$

Dengan:

Y_{it} : variabel dependen pada individu ke- i dan waktu ke- t

β_0 : konstantan atau intersep

X_{jit} : variabel dependen ke- j pada individu ke- i dan waktu ke- t

$\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_j$: koefisien slope untuk variabel dependen yang tetap konstan

α : efek tetap yang menunjukkan perbedaan intersep antar individu

ε_{it} : *error term*

Random Effect Model (REM)

Model ini menganggap perbedaan antar individu dan waktu bersifat acak dan menjadi bagian dari error (disebut juga Error Component Model). Metode ini lebih efisien karena tidak mengurangi derajat kebebasan seperti pada model Fixed Effect. Pemilihan antara Fixed Effect dan Random Effect dilakukan dengan Uji Hausman, di mana hasil signifikan menunjukkan model Fixed Effect lebih sesuai, sedangkan jika tidak signifikan maka model Random Effect dapat digunakan. (Sugiyono, 2019).

Secara umum, persamaan Random Effect Model adalah sebagai berikut.

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \dots + \beta_j X_{jit} + \mu_i + \varepsilon_{it}$$

Dengan:

Y_{it} : variabel dependen pada individu ke- i dan waktu ke- t

β_0 : konstantan atau intersep

- X_{jit} : variabel dependen ke- j pada individu ke- i dan waktu ke- t
 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_j$: koefisien slope untuk variabel dependen yang tetap konstan
 μ_i : komponen acak yang menangkap variasi spesifik antar individu
 dan dihipotesiskan sebagai bagian dari *error term*
 ε_{it} : *error term*

Uji Spesifikasi Model

Uji Chow

Uji Chow yakni ujian untuk menentukan model *Common Effect Model* atau *Fixed Effect Model* yang paling tepat digunakan dalam mengestimasi data panel. Pengujian ini mengikuti distribusi F-statistik dengan menggunakan taraf signifikansi (α) 5%. Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H_0 : Model *Common Effect*

H_1 : Model *Fix Effect*

Kriteria pengujian ini adalah dilihat dari *p value* F statistik. Apabila nilai Prob < 0,05 maka H_0 ditolak, dan apabila sebaliknya, jika nilai Prob > 0,05 maka H_0 tidak ditolak. Jika H_0 tidak ditolak maka model yang digunakan adalah *Common Effect*. Namun jika H_0 ditolak dan H_1 diterima, maka model yang digunakan adalah *Fix Effect*. Jika yang terpilih pada uji Chow adalah *Fix Effect*, maka dilanjutkan dengan pengujian selanjutnya yaitu uji Hausman.

Uji Hausman

Uji *Hausman* adalah ujian untuk menentukan model *Common Effect Model* atau *Fixed Effect Model* yang paling tepat digunakan. Pengujian ini mengikuti distribusi *chi-square* pada derajat bebas ($k-1$) dengan menggunakan taraf signifikansi (α) 5%. Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H_0 : Model *Random Effect*

H_1 : Model *Fix Effect*

Kriteria pengujian ini adalah apabila nilai Prob < 0,05 maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, artinya model regresi panel yang sesuai adalah *Fix Effect* dan juga sebaliknya apabila nilai Prob > 0,05 maka H_0 diterima dan H_1 ditolak, artinya model estimasi regresi yang sesuai adalah model *Random Effect*.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menilai apakah data dalam suatu variabel atau kumpulan data terdistribusi secara normal atau tidak (Gulo, 2025). Penelitian ini akan menggunakan nilai probabilitas, dengan kriteria jika nilai probabilitas hasil pengujian $> 0,05$ maka dapat dikatakan bahwa data secara normal dan sebaliknya.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk mengidentifikasi hubungan linear yang mungkin ada antar variabel *independent* dalam model (Gulo, 2025). Dalam penelitian ini, pengujian multikolinearitas dilakukan dengan menggunakan *matrix correlation*. Apabila nilai matriks korelasi antar variabel bebas kurang dari 0,80, artinya antar variabel bebas tidak memiliki masalah multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk memastikan bahwa variansi residual dari suatu pengamatan tidak saling tumpang tindih dengan pengamatan lainnya (Gulo, 2025). Dalam penelitian ini, pengujian heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan uji *Glejser*. Apabila nilai probabilitas masing-masing variabel bebas $> 0,05$, maka dapat disimpulkan tidak adanya heteroskedastisitas, jika nilai probabilitas $< 0,05$, maka terdapat heteroskedastisitas.

Uji Hipotesis

Uji Parsial (t-stat)

Uji t bertujuan mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen.

- Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau $Sig > 0,05 \rightarrow H_0$ diterima (tidak berpengaruh signifikan).
- Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $Sig < 0,05 \rightarrow H_0$ ditolak (berpengaruh signifikan).

Uji Simultan (F-stat)

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah semua variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Menurut Ghazali (2018), jika nilai signifikansi $< 0,05$ maka variabel independen berpengaruh signifikan secara simultan terhadap variabel dependen.

- Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ atau $Sig > 0,05 \rightarrow H_0$ diterima (tidak berpengaruh signifikan).
- Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau $Sig < 0,05 \rightarrow H_0$ ditolak (berpengaruh signifikan).

Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R²)

Uji Adjusted R² digunakan untuk melihat seberapa besar variabel independen mampu menjelaskan variasi variabel dependen. Nilai Adjusted R² berkisar antara 0–1. Semakin mendekati 1, semakin besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Nilai > 0,5 menunjukkan model tergolong baik.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Hasil Uji Chow

Uji *chow* merupakan salah satu metode pengujian dalam menentukan model *fixed effect* atau *common effect* yang tepat untuk digunakan dalam menganalisis data panel. Jika nilai probabilitas > 0,05, maka model yang tepat untuk digunakan adalah *common effect*, sedangkan jika < 0,05, maka model yang tepat untuk digunakan adalah *fixed effect*.

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: Untitled
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	20.717984	(8,78)	0.0000
Cross-section Chi-square	102.546824	8	0.0000

Gambar 2. Hasil Uji *Chow*

Sumber: Data Diolah

Berdasarkan hasil uji *chow* di atas, nilai probabilitas sebesar $0,0000 < 0,05$ taraf signifikansi, artinya H₀ di tolak dan model yang terpilih adalah *Fixed Effect* Model. Maka pengujian selanjutnya menggunakan Uji *Hausman*.

Uji Hausman

Uji *Hausman* merupakan alat uji statistik yang digunakan untuk menentukan apakah model *fixed effect* atau *random effect* lebih sesuai untuk digunakan. Apabila nilai probabilitas *Cross-section random* > 0,05, maka model *random effect* dianggap lebih tepat. Sebaliknya, jika nilai probabilitas tersebut < 0,05, maka model yang lebih sesuai adalah *fixed effect*.

Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation: Untitled
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	11.161416	3	0.0109

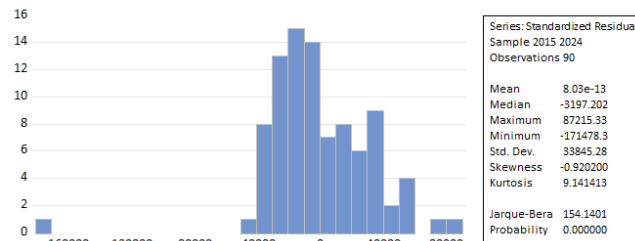
Gambar 3. Hasil Uji *Hausman*

Sumber: Data Diolah

Berdasarkan hasil uji *hausman* di atas, nilai probabilitas sebesar $0,0109 < 0,05$ taraf signifikansi, artinya H_0 di tolak dan model yang terpilih adalah *Fixed Effect Model*. Maka ketika uji *hausman* dilakukan dan yang terpilih adalah FEM maka tidak perlu di lanjutkan ke uji selanjutnya, dan model yang terpilih adalah *Fixed Effect Model*.

Hasil Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas



Gambar 3. Hasil Uji Normalitas

Sumber: Data Diolah

Dari hasil di atas, data ini tidak lulus uji normalitas.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengevaluasi apakah terdapat hubungan antar variabel independen dalam suatu model regresi. Jika terjadi korelasi, maka hubungan variabel dalam satu regresi disebut dengan multikolinearitas.

Correlation			
	INF	PDRB	UMP
INF	1.000000	0.252825	-0.162961
PDRB	0.252825	1.000000	0.695783
UMP	-0.162961	0.695783	1.000000

Gambar 4. Hasil Uji Multikolinearitas

Sumber: Data Diolah

Berdasarkan hasil pengujian di atas, nilai koefisien korelasi X_1 dan X_2 sebesar $0,252825 < 0,90$, X_1 dan X_3 sebesar $-0,162961 < 0,90$, dan X_2 dan X_3 sebesar $0,695783 < 0,90$. Maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut tidak terdapat masalah multikolinearitas atau lolos uji multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terdapat ketimpangan varians residu dari pengamatan yang satu ke pengamatan yang lain. Model regresi dianggap baik apabila memiliki residual yang seragam, yang dikenal sebagai homoskedastisitas atau tidak terjadinya heteroskedastisitas. Dasar pengambilan keputusan didasarkan pada nilai probabilitas, yaitu: 1) Jika nilai probabilitas $> 0,05$, maka tidak terjadi

heteroskedastisitas; 2) Jika nilai probabilitas $< 0,05$, maka terjadi heteroskedastisitas (Basuki & Prawoto, 2017).

Dependent Variable: RESABS Method: Panel Least Squares Date: 09/30/25 Time: 20:56 Sample: 2015 2024 Periods included: 10 Cross-sections included: 9 Total panel (balanced) observations: 90				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	35545.51	20964.04	1.695547	0.0940
INF	-1172.284	3265.595	-0.358980	0.7206
PDRB	-1.294082	0.492840	-2.625765	0.0104
UMP	0.024530	0.007254	3.381854	0.0011
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
Root MSE	20194.71	R-squared	0.227533	
Mean dependent var	24593.13	Adjusted R-squared	0.118595	
S.D. dependent var	23105.95	S.E. of regression	21692.60	
Akaike info criterion	22.93090	Sum squared resid	3.67E+10	
Schwarz criterion	23.26420	Log likelihood	-1019.890	
Hannan-Quinn criter.	23.06530	F-statistic	2.088655	
Durbin-Watson stat	1.481533	Prob(F-statistic)	0.030790	

Gambar 5. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Sumber: Data Diolah

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa masing-masing variabel independen untuk Inflasi sebesar 0,7206, menunjukkan $> 0,05$, artinya tidak terdapat indikasi adanya heteroskedastisitas. Sedangkan PDRB sebesar 0,0104, dan UMP sebesar 0,0011 menunjukkan $< 0,05$. Di mana hasil tersebut berarti variabel terdapat masalah Heteroskedastisitas.

Pembahasan

Dependent Variable: GK Method: Panel Least Squares Date: 09/30/25 Time: 20:40 Sample: 2015 2024 Periods included: 10 Cross-sections included: 9 Total panel (balanced) observations: 90				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	24987.12	34938.90	0.715166	0.4766
INF	-1298.988	5442.477	-0.238676	0.8120
PDRB	0.449494	0.821372	0.547247	0.5858
UMP	0.181040	0.012089	14.97580	0.0000
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
Root MSE	33656.72	R-squared	0.927332	
Mean dependent var	513034.8	Adjusted R-squared	0.917084	
S.D. dependent var	125552.9	S.E. of regression	36153.12	
Akaike info criterion	23.95248	Sum squared resid	1.02E+11	
Schwarz criterion	24.28579	Log likelihood	-1065.862	
Hannan-Quinn criter.	24.08689	F-statistic	90.48873	
Durbin-Watson stat	1.048606	Prob(F-statistic)	0.000000	

Gambar 6. Hasil Olah Data

Sumber: Data Diolah

Setelah dilakukan pemilihan model regresi data panel, tahap berikutnya adalah melakukan analisis regresi. Analisis ini bertujuan untuk melihat hubungan antar variabel, serta menunjukkan arah pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Berdasarkan hasil uji pemilihan model, maka model terbaik yang digunakan untuk penelitian ini yaitu *Fixed Effect Model*. Persamaan model secara umum dapat dinyatakan melalui persamaan berikut:

$$Y_{it} = 24987,12 - 1298,988X_1 + 0,449494X_2 + 0,181040X_3$$

Uji T (Uji Parsial)

Uji t digunakan untuk menilai sejauh mana pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. Dari hasil di atas, Variabel Inflasi dan PDRB tidak berpengaruh signifikan terhadap Garis kemiskinan, karena hasil Probabilitas yang $> \alpha$ (0,05). Sedangkan hanya variabel Upah Minimum Provinsi (UMP) terhadap Garis Kemiskinan dengan probabilitas sebesar $0,0000 < \alpha$ (0,05).

Uji F (Uji Simultan)

Uji F dilakukan untuk menguji hipotesis yang diajukan dalam penelitian dan mengetahui pengaruh yang ditimbulkan dari masing-masing variabel independen secara bersamaan terhadap variabel dependen. Berdasarkan hasil analisis di atas diperoleh nilai probabilitas lebih kecil dari tingkat signifikansi yaitu sebesar $0,000000 < 0,05$, maka H_0 ditolak, artinya secara simultan variabel Inflasi, PDRB, UMP berpengaruh signifikan terhadap Garis Kemiskinan di Indonesia.

Koefisien determinasi (R-Square)

Dapat dilihat dari hasil di atas, nilai adjusted R-squared sebesar 0.917084 atau 91.7 %. Artinya Variabel Inflasi, PDRB dan UMP mampu menjelaskan variabel Garis Kemiskinan sebesar 91.7%, sedangkan 8.3% sisanya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian.

Pengaruh Inflasi terhadap Garis Kemiskinan

Menurut Bank Indonesia Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas atau mengakibatkan kenaikan harga pada barang lainnya. Kebalikan dari inflasi disebut deflasi. Dari hasil penelitian yang kami lakukan, Inflasi tidak memiliki pengaruh terhadap garis kemiskinan hal ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Terhadap, Kemiskinan, and Sumatera 2021) yang mana hasilnya inflasi berpengaruh terhadap garis kemiskinan. Hasil penelitian ini Inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap garis kemiskinan pada tahun 2015-2024 bisa saja terjadi

dikarenakan adanya kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah berupa subsidi atau bantuan sosial untuk mengurangi dampak inflasi yang terjadi.

Pengaruh PDRB terhadap Garis Kemiskinan

Menurut Badan Pusat Statistik Kabupaten Penajam Paser Utara, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode. Hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa PDRB tidak berpengaruh signifikan terhadap Garis kemiskinan, hasil ini berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh (Arif and Alfana 2024). Hasil dari penelitian menunjukkan, setelah pandemi Covid-19 tahun 2020-2021, terdapat hubungan yang signifikan antara kondisi kondisi ekonomi yang diwakili oleh variabel garis kemiskinan, indeks keparahan kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Maka dari hasil penelitian bahwa PDRB tidak berpengaruh signifikan, hal ini bisa saja terjadi karena PDRB merupakan nilai total produksi barang dan jasa di suatu daerah, tanpa memperhatikan bagaimana distribusi pendapatan di masyarakat di suatu daerah. Lalu garis kemiskinan bisa saja dipengaruhi oleh faktor lain seperti Indikator Pembangunan Manusia (IPM), tingkat pengangguran, dan rata-rata lama sekolah.

Pengaruh UMP terhadap Garis Kemiskinan

Upah Minimum Provinsi Adalah Upah Minimum di suatu kabupaten atau kota. Dari hasil penelitian yang dilakukan Upah Minimum Provinsi berpengaruh signifikan terhadap Garis Kemiskinan yang artinya Jika Upah Minimum Provinsi di suatu Provinsi meningkat artinya ada peningkatan minimum upah yang diterima pekerja yang mana jika upah yang diterima pekerja meningkat maka kemampuan mereka untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, dan papan meningkat. Hal ini dapat membantu menurunkan angka kemiskinan karena masyarakat yang sebelumnya berada di bawah atau dekat garis kemiskinan bisa memiliki pendapatan cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup layak.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil analisis regresi terhadap dinamika Garis Kemiskinan (GK) di 10 provinsi Indonesia menunjukkan bahwa variabel dependen tersebut sebagai batas pengeluaran minimum untuk hidup layak dipengaruhi oleh tiga variabel utama yang terbukti berpengaruh signifikan.. Inflasi dan PDRB memiliki pengaruh yang tidak signifikan, mengindikasikan bahwa kenaikan harga barang dan jasa pokok secara langsung meningkatkan ambang batas Garis Kemiskinan (GK) dan berpotensi menambah jumlah penduduk miskin. Sementara itu,

Upah Minimum Provinsi (UMP) juga terbukti berpengaruh signifikan terhadap Garis Kemiskinan; peningkatan UMP secara langsung meningkatkan daya beli minimum pekerja, memungkinkan mereka untuk memenuhi kebutuhan dasar di atas batas kemiskinan. Secara keseluruhan, temuan ini menyatakan pentingnya stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi inklusif sebagai kunci utama untuk mengendalikan dan menurunkan Garis Kemiskinan di Indonesia.

Saran pada penelitian ini adalah sebagai berikut. Pertama, pengendalian inflasi perlu diperkuat dengan koordinasi antara kebijakan moneter dan fiskal, khususnya dalam mengendalikan harga barang kebutuhan pokok dan non-pangan. Stabilitas harga akan membantu menahan laju kenaikan Garis Kemiskinan (GK), sehingga jumlah penduduk miskin tidak meningkat secara artifisial. Selain itu, masalah logistik dan distribusi regional harus diatasi untuk menekan biaya dan variasi harga antar provinsi, karena GK sangat dipengaruhi oleh ketidaksetaraan harga barang-barang kebutuhan pokok. Kedua, untuk peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), pemerintah perlu memastikan bahwa kenaikan PDRB di tingkat provinsi disertai dengan penciptaan lapangan kerja yang berkualitas dan peningkatan pendapatan bagi kelompok berpenghasilan rendah. Langkah ini dapat memperkuat daya beli dan menekan Garis Kemiskinan. Pemerintah juga perlu memberikan insentif dan dukungan untuk pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta sektor-sektor berbasis sumber daya lokal yang memiliki potensi penyerapan tenaga kerja tinggi, khususnya di luar sektor modern yang pertumbuhannya tidak merata.

Ketiga, terkait kebijakan upah dan kesejahteraan, Upah Minimum Provinsi (UMP) terbukti penting dalam membantu pemenuhan kebutuhan dasar pekerja. Namun, kenaikan UMP yang terlalu tajam dapat meningkatkan biaya hidup dan berpotensi menggeser Garis Kemiskinan ke atas. Oleh karena itu, penetapan UMP harus mempertimbangkan tingkat produktivitas dan kondisi riil ekonomi daerah, bukan hanya faktor politik. Keempat, pendekatan regional yang terstruktur sangat penting mengingat data Garis Kemiskinan yang bervariasi antar provinsi. Pemerintah Pusat dan Daerah perlu merancang program pengentasan kemiskinan yang disesuaikan dengan karakteristik dan tantangan unik di masing-masing wilayah, bukan menerapkan kebijakan yang seragam secara nasional.

DAFTAR REFERENSI

- Amalia, F. (2012). Pengaruh pendidikan, pengangguran dan inflasi terhadap tingkat kemiskinan di kawasan timur Indonesia (KTI) periode 2001-2010. *X*, 158–169. <https://doi.org/10.21009/econosains.0102.02>
- Ammar, T., & Nugraha, A. (2022). Pemodelan regresi data panel pada faktor terbuka di Jawa Barat. *147–161*.
- Arif, M., & Alfana, F. (2024). Pengaruh kondisi ekonomi terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Jawa Tengah tahun 2020-2022. *Qorisa Nur Laila, Muhammad Arif Fahrudin Alfana, S.Si., M.Sc.*, 119–127.
- Artikel, I. (2020). Abstrak distribusi pendapatan di Pulau Jawa masih belum merata, pertumbuhan ekonomi di. *3(2)*, 21–34.
- Aulia, R., Marpaung, R., Sintia, I., & Rahayu, F. (2023). Analysis of the effect of open unemployment rate and human development index on poverty in North Sumatra province. *2(5)*, 361–376. <https://doi.org/10.55927/ijar.v2i5.4141>
- Bank Indonesia. (n.d.). Inflasi.
- D, G. I., T Naukoko, A., & Mandej, D. (2022). Efisiensi terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Tana Toraja. *Jurnal Berkala Ilmiah*, *22(6)*, 13–24.
- Fakultas Bisnis, Ilmu Sosial, & Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. (2024). Pertumbuhan ekonomi di Indonesia. *7*, 10347–1059.
- Faradis, R., & Afifah, U. N. (2023). Poverty line based on the large archipelagic area in. *8(2)*, 222–235. <https://doi.org/10.20473/jiet.v8i2.46331>
- Gulo, J. (2025). Identifikasi faktor penentu kemiskinan di Indonesia melalui pendekatan regresi linier berganda.
- Janet, M., Simanjuntak, L., & Riwayat Artikel. (2025). Garis kemiskinan di DKI Jakarta: Analisis regresi non-linear dengan GAM. *2(2)*, 457–465. <https://doi.org/10.62335/aksioma.v2i2.868>
- Kamagi, S. H. R., Yunus, R., Parinding, K. A., & Yunus, S. (2024). Jurnal politik dan pemerintahan daerah vol 6 no 2 tahun 2024, p 257-270. *6(2)*, 257–270. <https://doi.org/10.36355/jppd.v6i2.179>
- Kemiskinan, D. (2023). Pengenalan indikator kemiskinan dan ketimpangan.
- Kuliah, M. (2026). Jadwal ujian tengah semester ganjil jurusan ekonomi pembangunan tahun akademik 2025/2026. *5–8*.
- Laut, L. T., Putri, A. S., & Septiani, Y. (2020). Pengaruh PMA, PMDN, TPAK, PDRB perkapita, pengeluaran pemerintah terhadap disparitas pendapatan Jawa. *Stability: Journal of Management and Business*, *3(2)*, 21–34. <https://doi.org/10.26877/sta.v3i2.7781>
- Mahila, S. (2017). Analisis mekanisme penetapan upah minimum Provinsi Jambi tahun 2015. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, *15(3)*, 164–170.
- Mahila, S. (2017). Analisis mekanisme penetapan upah minimum Provinsi Jambi tahun 2015. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, *15(3)*, 164–170.
- Manajemen, J. (2022). Analisis pengaruh jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan. *7(2)*, 1311–1315. <https://doi.org/10.33087/jmas.v7i2.593>

World Bank. (2025). Bank Dunia memperbarui garis kemiskinan global: Indonesia.

World Bank. (2025, June 13). Bank Dunia memperbarui garis kemiskinan global: Indonesia.